

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jalan merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan kehidupan bernegara dan berbangsa. Jalan merupakan prasarana transportasi yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakat umum, seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu aset publik utama dalam transportasi adalah jalan. Jalan merupakan infrastruktur yang paling sering digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan, kerja, bisnis, ekonomi, dan lain-lain, karena hal tersebut menjadi salah satu pendukung utama aktivitas sosial ekonomi suatu negara. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Jalan No. 34 Tahun 2006 tentang jalan yang menyebutkan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi yang memegang peranan penting dalam bidang pertahanan keamanan, politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup (Pemerintah Indonesia, 2006).

Bertambahnya umur jalan menyebabkan penurunan kondisi jalan, sehingga dapat memperlambat aktivitas masyarakat. Jalan kabupaten dan jalan provinsi merupakan bagian dari jalan daerah. Pendanaan yang cukup besar dibutuhkan sebagai penunjang utama kegiatan ekonomi, sosial, dan pengembangan wilayah yang direncanakan dalam umur tertentu. Oleh karena itu pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi perlu melakukan upaya agar jalan tersebut dapat memberikan pelayanan sesuai dengan umur yang direncanakan melalui pemeliharaan jalan yang optimal. Sehingga diperlukan teknik manajemen atau pengelolaan aset jalan yang tepat.

Provinsi Sumatera Barat memiliki 58 Ruas Jalan yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Barat (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2015). Berdasarkan data kemandapan jalan tahun 2021 untuk jalan provinsi yang berada pada 58 ruas tersebar diseluruh wilayah Sumatera Barat memiliki tingkat kemandapan jalan yaitu sebesar 75.031 %. Kondisi kerusakan yang dominan pada data tersebut adalah Rusak ringan dan rusak berat. Hal tersebut

memperlihatkan bahwa kondisi jalan tersebut berubah sewaktu-waktu berdasarkan tingkat lalu lintas dan kondisi cuaca.

Dari 58 ruas, ada lima ruas strategis dalam objek penelitian ini, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 terdapat ruas yang termasuk pada wilayah kawasan pengembangan dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara yaitu ruas Teluk Bayur Nipah-Purus (P.098) berlokasi di Padang dan ruas Simpang Duku-Ketaping (P.075) berlokasi di Pariaman. Kawasan peningkatan jaringan transportasi sungai dan danau serta akses menuju kawasan pertanian / perkebunan yaitu ruas Sangir-Sungai Dareh (P.056) yang berlokasi di Solok Selatan- Damasraya. Kawasan pengembangan destinasi pariwisata, kawasan taman wisata alam dan perwujudan prasarana sumber daya air yaitu ruas Panti – Simp. Empat (P.031) yang berlokasi di Kabupaten Pasaman Barat. Kawasan perkebunan dan pertanian dan juga sebagai pembangunan prasarana pengendalian banjir yaitu ruas Suranti – kayu Aro – Langgai berlokasi di kabupaten Pesisir Selatan (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2012). Kelima ruas tersebut mengalami kerusakan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat berdasarkan data kondisi jalan tahun 2021 dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan UMUM Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, Penyelenggaraan jalan wajib menyusun rencana pemeliharaan jalan. Penanganan pemeliharaan jalan ini meliputi pemeliharaan berkala, rehabilitas jalan dan pemeliharaan rutin, termasuk perlengkapan jalannya dan bangunan pelengkap lainnya (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2011).

Pada tahun 2022 telah hadir metoda survei jalan yang digunakan pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yaitu *Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS)* yang merupakan metode teknis yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pemeliharaan data untuk menghasilkan informasi dan rekomendasi

penanganan pemeliharaan jalan, menghitung kebutuhan anggaran pemeliharaan penanganan jalan yang dapat menentukan prioritas penanganan jalan.

Metoda AHP berbasis PKRMS merupakan metoda menentukan prioritas penanganan jalan yang meninjau dari data teknis (PKRMS) dan data nonteknis atau survei terhadap masyarakat sebagai pengguna fasilitas jalan. Dengan kombinasi dari data teknis dan non teknis diharapkan hasil yang diperoleh lebih optimal. Sehingga dilakukan suatu penelitian dengan judul **PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN JARINGAN JALAN PROVINSI METODA ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) BERBASIS PKRMS (Provincial/Kabupaten Road Management System)**

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Merekomendasikan jenis penanganan terhadap jalan berdasarkan hasil dari survei Inventarisasi jalan, kondisi jalan, lalu lintas harian rata-rata (LHR).
2. Memperoleh biaya penanganan pemeliharaan jalan digunakan sebagai dasar perencanaan.
3. Menentukan ruas prioritas penanganan jaringan Provinsi Metoda AHP (Analytical Hierarchy Process) yang berbasis PKRMS.

1.3 Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Objek terhadap penelitian berfokus pada satuan ruas jalan provinsi yang terdapat pada SK jalan Provinsi No. 600-903.1-2015 tahun 2015. Terhadap 5 ruas strategis provinsi Sumatera Barat yaitu :
 - a. Ruas Jalan Panti – Simpang Empat (P.031)
 - b. Ruas Abai Sangir – Sungai Dareh (P.056)
 - c. Ruas Simp. Duku- Ketaping (P.075)
 - d. Ruas Surantih – Kayo Aro – Langgai (P.086)
 - e. Ruas Teluk Bayur – Nipah – Purus (P.098)

2. Penentuan prioritas berbasis PKRMS, dilakukan dengan analisis yang mencakup inventaris jalan, kondisi jalan, Lalu Lintas Harian Rata-rata atau LHR dan Biaya melalui aplikasi PKRMS
3. Penentuan prioritas berdasarkan Metoda AHP (Analytical Hierarchy Process) yang dilakukan dengan cara kuisioner terhadap beberapa responden bersumber dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dan Instansi Pemerintah / masyarakat yang berada pada lokasi ruas jalan penelitian.

1.4 Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian berbasis PKRMS (*Provincial/ Kabupaten Road Management System*) ini dinas PU Provinsi dapat memperoleh prioritas dan perhitungan anggaran secara optimal terhadap penangganan jalan.

